

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi pengaruh alokasi *pro-poo budget* terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Banten ditinjau dari ekonomi syariah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap dokumen pelaporan mengenai perda tentang perubahan APBD provinsi Banten tahun anggaran 2009-2012. persproporsi belanja tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran Pemprov Banten masih belum *pro-poor budget*. Dikarenakan baik alokasi Belanja Langsung Pendidikan dan Belanja Langsung Kesehatan masih mendapatkan porsi yang sangat minin, terutama Belanja Langsung Pendidikan rata-rata masih berada dibawah 10% dari total Belanja Daerah, sedangkan menurut Undang-Undang bahwa besarnya alokasi Belanja Pendidikan minimal 20% dari total belanja.
2. Sedangkan besarnya perubahan anggaran Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan selama tahun anggaran 2009-2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Data Perubahan Anggaran atas Dasar Nominal Riil**

TAHUN	PERUBAHAN ANGGARAN (NOMINAL RIIL)	
	PENDIDIKAN	KESEHATAN
2008		
2009	Rp 7.182.406.867	Rp 53.577.343.174,00
2010	Rp 57.461.632.470	Rp 30.780.480.475,00
2011	Rp 15.109.727.910	Rp 43.495.526.000,00
2012	Rp 34.732.999.667	Rp (5.590.000.000,00)

3. Berdasarkan pengujian data secara statistik melalui analisis regresi linier berganda secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan taraf signifikansi sebesar 0,000 atau sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM.
4. Berdasarkan pengujian data secara statistik melalui analisis regresi linier berganda secara simultan, nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar  $r = 0,483$  yang berarti kontribusi atau pengaruh yang diberikan belanja langsung pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat IPM provinsi Banten sebesar 48%

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap pengelolaan APBD untuk kedepannya lebih dimaksimalkan dan benar-benar *pro-poor* baik dalam proses penganggaran maupun pengelolaan. Terlebih mengingat begitu besarnya pengaruh belanja langsung program-program wajib terhadap peningkatan IPM. Bagaimanapun keberhasilan pemerintahan daerah tercermin pada pendistribusian dan pengelolaan APBD setempat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperkaya sumber informasi mengenai laporan penggunaan APBD diseluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Banten sehingga akan lebih sinkron jika dihubungkan dengan tingkat IPM Provinsi Banten dan dibarengi dengan menggunakan metode penelitian yang lebih relevan dibidang studi kebijakan.
3. Salah satu kekurangan penelitian ini adalah keterbatasan pada akses dokumen APBD yang tidak dipublis secara detil oleh masing-masing Pemda dan Pemkot sehingga kurang begitu relevan membandingkan alokasi satu kota/kabupaten dengan tingkat IPM Provinsi. Sehingga perlu diperkaya dokumen terkait realisasi APBD untuk penelitian selanjutnya yang serupa.